KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2021, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukkan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Surabaya, Januari 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621115 198903 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur adalah meningkatkan daya saing industri manufaktur dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Struktur perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada tahun 2021 kedua sektor tersebut berkontribusi sebesar 49,88%. Artinya bahwa sektor industri dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian Jawa Timur.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

TUJUAN 1	:	Meningkatnya nilai tambah produksi mendapat predikat pada Kategori **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator tujuan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis yang menghasilkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori sangat baik.
TUJUAN 2	:	Meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan mendapat predikat pada Kategori **Cukup**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator tujuan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yang menghasilkan 1 (satu) Indikator kinerja Utama (IKU) kategori sangat baik dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori kurang baik.
(Supporting)	:	Mendukung dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui 1 (satu) Sasaran Strategis yang menghasilkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori sangat baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……. i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……. ii
DAFTAR ISI ……. iii
DAFTAR GAMBAR ……. iv
DAFTAR TABEL ……. v
DAFTAR GRAFIK ……. vii

BAB I 19

PENDAHULUAN 19

1.1. STRUKTUR ORGANISASI 19

1.2 TUGAS DAN FUNGSI 20

1.3 ISU STRATEGIS 24

1.4 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD) 28

1.5 PETA PROSES BISNIS 31

1.6 RINGKASAN HASIL EVALUASI 35

BAB II 38

PERENCANAAN KINERJA 38

2.1 RENCANA STRATEGIS 38

2.2 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 40

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 40

BAB III 44

AKUNTABILITAS KINERJA 44

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 44

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA 2020 46

3.3 REALISASI ANGGARAN 80

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 83

BAB IV 66

PENUTUP 66

LAMPIRAN 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur 19
Gambar 1.2 : Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024..... 31
Gambar 1.3 : Renstra Disperindag Prov. Jatim (review)..... 12
Gambar 1.4 : Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur..... 32
Gambar 1.5 : Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Utama..... 32
Gambar 1.6 : Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Manajerial..... 33
Gambar 1.7 : Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Pendukung 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Tahun 2020 35
Tabel 2.1 : Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan RENSTRA 2019-2024 Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan 41
Tabel 2.2 Tujuan, Indikator dan Target RENSTRA 2019-2024 41
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020 42
Tabel 3.1 : Program/Kegiatan Penunjang Arah Pencapaian Kinerja 44
Tabel 3.2 : Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2020 45
Tabel 3.3 : Sasaran Strategis 1 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2015-2020 46
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya .. 46
Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD 47
Tabel 3.6 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 47
Tabel 3.7 : Alokasi per Sasaran Pembangunan 47
Tabel 3.8 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 47
Tabel 3.0.9 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 48
Tabel 3.10 : Ekspor Non Migas Tahun 2020 (US$ Milyar) 51
Tabel 3.11 : 10 Komoditi Utama Ekspor Non Migas Tahun 2020 (US$ Milyar) 51
Tabel 3.12 : Capaian Target Tahapan Penyelesaian RPIP 2020 52
Tabel 3.13 : Fasilitasi Standardisasi Produk Industri di Jawa Timur th. 2016-2020 52
Tabel 3.14 : Capaian Kinerja Pelayanan UPT Industri 53
Tabel 3.15 : Perkembangan Industri Besar di Jawa Timur 54
Tabel 3.16 : Sasaran Strategis 2 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2016-2020 57
Tabel 3.17 : Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir periode RPJMD 57
Tabel 3.18 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 57
Tabel 3.19 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional .. 58
Tabel 3.20 : Alokasi per Sasaran Pembangunan 58
Tabel 3.21 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 58
Tabel 3.22 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 58
Tabel 3.23 : Kinerja Perdagangan Barang dan Jasa th. 2016-2020 61
Tabel 3.24 : Net Ekspor Impor Non Migas dan Kontribusi Jawa Timur Tahun 2016-2020 67
Tabel 3.25 : Sasaran Strategis 3 72
Tabel 3.26 : Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir periode Renstra 72

Tabel 3.27 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 72
Tabel 3.28 : Alokasi per Sasaran Pembangunan 72
Tabel 3.29 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 73
Tabel 3.30 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 73
Tabel 3.31 : Realisasi Kinerja Perlindungan Konsumen 73
Tabel 3.32 : Realisasi Sertifikasi Mutu Produk Tahun 2016-2020 74
Tabel 3.33 : Rumusan Peningkatan Barang yang Diawasi dan Sertifikasi Barang Beredar Tahun 2016-2020 75
Tabel 3.34 : Sasaran Strategis 4 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2015-2020 77
Tabel 3.35 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 77
Tabel 3.36 : Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir periode RPJMD 77
Tabel 3.0.37 : Alokasi per Sasaran Pembangunan 78
Tabel 3.38 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 78
Tabel 3.39 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 78
Tabel 3.40 : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 80
Tabel 3.41 : Realisasi Anggaran APBD per Sasaran Strategis dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 82
Tabel 3.42 : Realisasi APBN (Dekonsentrasi) Tahun 2020 82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Jatim terhadap Nasional th. 2016-2020 48
Grafik 3.2 : Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri th. 2016-2020 49
Grafik 3.3 : Perkembangan Pendayagunaan Industri di Jawa Timur 50
Grafik 3.4 : Perkembangan Industri Besar di Jawa Timur..... 54
Grafik 3.5 : Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor Jatim terhadap Nasional th. 2016-2020..... 59
Grafik 3.6 : Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan th. 2016-2020 60
Grafik 3.7 : Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Total PDRB Jawa Timur..... 53
Grafik 3.8 : Jumlah dan Persentase Barang yang Diawasi dan Sertifikasi Mutu Produk Tahun 2016-2020..... 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Disebutkan dalam PERDA Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2016, pada Bab IV, pasal 4 bahwa ***"****Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang"*. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 tahun 2018, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 unit eselon II, 20 unit eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang, 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana gambar 1.1.

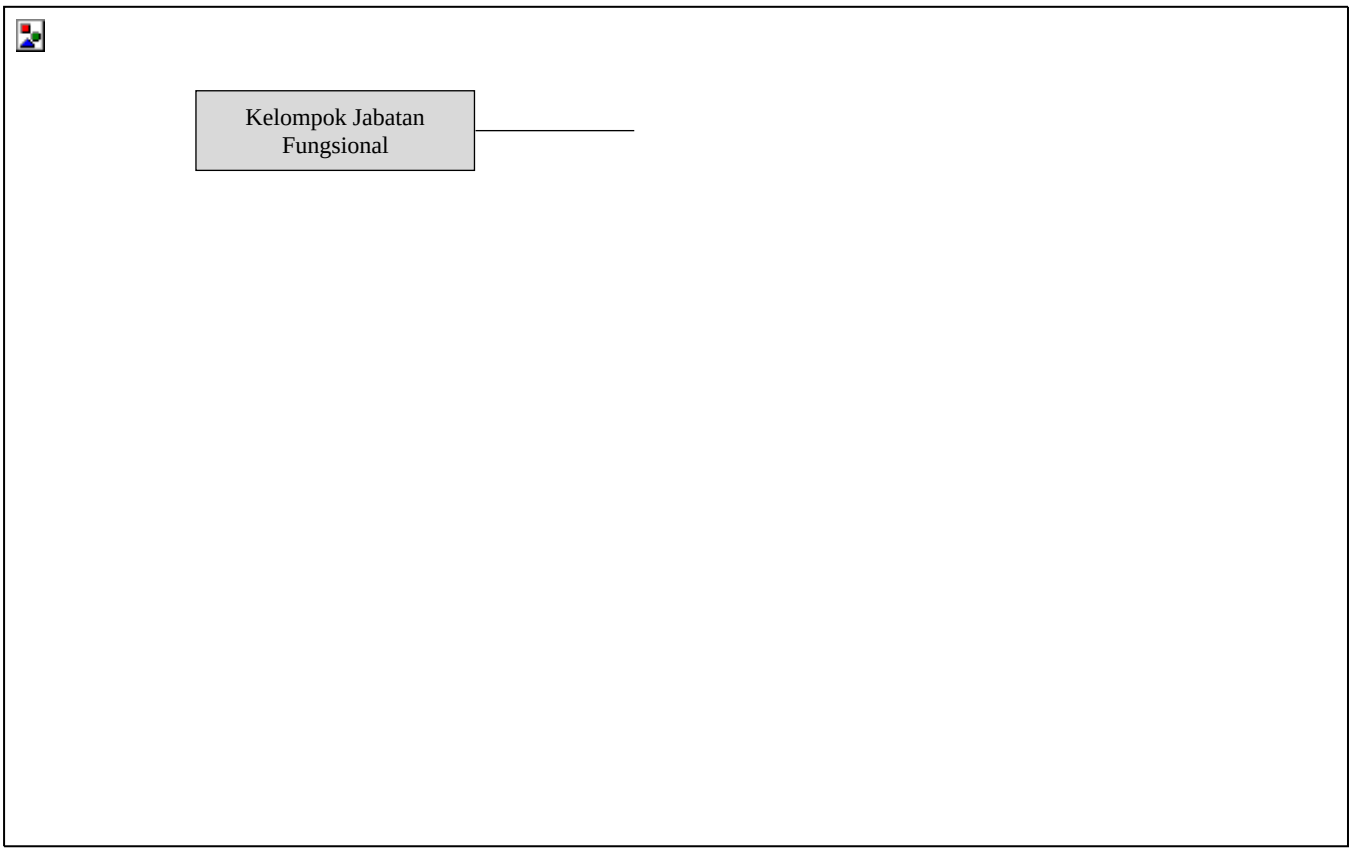

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tugas :

Sesuai PERGUB Provinsi Jawa Timur No. 68 tahun 2016 tanggal 27 September 2016, dalam Bab III Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 4, bagian ayat (1) disebutkan bahwa ***"Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang perindustrian dan perdagangan".***

Fungsi :

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1) ***Sekretariat***, dengan tugas "Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol".

2) ***Bidang Industri Agro***, dengan tugas "Menyelenggaran perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar".
3) ***Bidang Industri Non Agro***, dengan tugas "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis industri logam, mesin dan alat transportasi, industri kimia, tekstil dan aneka, serta industri telematika".
4) ***Bidang Perdagangan Dalam Negeri***, dengan tugas "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha, distribusi, logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta barang kebutuhab pokok dan barang penting".
5) ***Bidang Perdagangan Internasional***, dengan tugas "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional".
6) ***Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan***, dengan tugas *"Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerjasama sektor industri dan perdagangan, serta pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data serta memberikan rekomendasi penerbitan perizinan industri dan perdagangan"*
7) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Surabaya***, dengan tugas "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu,

sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

8) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember***, dengan tugas "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
9) ***UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
10) ***UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
11) ***UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
12) ***UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
13) ***UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
14) ***UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas

Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".

15) ***UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".
16) ***UPT Perlindungan Konsumen Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya".
17) ***UPT Perlindungan Konsumen Malang***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang".
18) ***UPT Perlindungan Konsumen Jember***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember".
19) ***UPT Perlindungan Konsumen Kediri***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri".
20) ***UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro".

1.3 ISU STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan;
c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan demikian isu strategis seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 pada BAB III, disebutkan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu-antara-hilir), optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
2. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas;

3. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
5. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu tembakau.

Sedangkan pada Renja tahun 2021 pada BAB II sebagai berikut:

1. Dampak covid-19 yang dominan adalah pada penyediaan dan proses produksi.
2. Kegiatan industri yang terganggu.
3. Kesulitan dalam perdagangan internasional karena masih sulitnya keluar masuk dari negara lain.
4. Pemberlakuan *New Normal* yang berdampak pada proses produksi.

Isu nasional yang masih menjadi perhatian dan menjadi sangat penting agar kolaborasi pembangunan antara pusat dan daerah baik di sektor industri maupun perdagangan dapat berjalan secara berkesinambungan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ***Terjadi Pandemi Covid-19***

  Pandemi Covid-19 telah hampir melumpuhkan seluruh kegiatan di Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Sampai dengan berjalannnya tahun 2021, upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan protokol

kesehatan mulai memberikan hasil kendati masih dirasa belum optimal.. Untuk itulah sektor industri dan perdagangan diharapkan bisa dijadikan tumpuan besar terhadap recovery perekonomian Indonesia. Dengan demikian optimis pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 bisa diwujudkan.

- ***Belum Optimalnya Daya Saing Infrastruktur***

  Kondisi Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada saat ini patut diwaspadai, khususnya pada kondisi jaringan jalan yang mana jalan dengan kondisi baik ada pada 20% dari total panjang jalan yang ada, sedangkan untuk kondisi jembatan 94% sudah dalam kondisi baik, dan kondisi jaringan drainase 74% baik. Perubahan kondisi infrastruktur secara umum memberikan dampak terhadap semua penduduk Provinsi Jawa Timur, karena infrastruktur merupakan barang publik murni dengan sifat *non-excludable* (tanpa ada larangan) dan *non-rivalry* (tanpa persaingan) dimana semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Namun, secara khusus perubahan kondisi infrastruktur akan sangat berdampak kepada pihak-pihak yang bergerak pada sektor perekonomian seperti, investor penanam modal, pelaku industri (besar, menengah, dan kecil), pelaku industri pariwisata.

- ***Alih Fungsi Lahan (Hutan dan Pertanian)***

  Semakin tingginya aktivitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kondisi ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dimana dampak positif adalah semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin tingginya resiko bencana erosi dan banjir, menurunnya ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih yang semakin sedikit. Kelompok masyarakat yang terkena dampak secara umum adalah seluruh penduduk Provinsi Jawa Timur. Secara khusus dampak dari pelaksanaan program tersebut akan berpengaruh

terhadap: Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku stakeholders, pelaku industri dan pariwisata, dan petani (baik buruh tani maupun pemilik lahan).

- ***Perubahan Iklim***

  Banyak rencana program dalam RPJMD Provinsi yang berdampak negatif terhadap elemen lingkungan terutama perubahan iklim. Rencana program tersebut umumnya meningkatkan kadar emisi GRK yang dilepaskan, sehingga perlu intervensi yang berupa upaya adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya.

- ***Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Alam***

  Program pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Sebagian besar kegiatan industri misalnya, menghasilkan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air sungai dan gas buang yang mengakibatkan polusi udara. Dengan demikian, perlu perhatian sungguh-sungguh untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pembangunan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

- ***Kesejahterahan Rakyat***

  Kegiatan pembangunan industri dan perdagangan selama lima tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

- ***Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***

  Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

- ***Kenaikan Upah Buruh dan Harga TDL untuk Industri***

Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi.

1.4 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Visi pembangunan Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"***. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi pendukung capaian, yaitu :

1. **Misi Pertama :** *Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah;*
2. **Misi kedua :** *Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan;*
3. **Misi ketiga :** *Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;*
4. **Misi keempat :** *Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.*

Dalam rangka mendukung *misi pertama* maka ditetapkan tujuan dari misi tersebut adalah **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar**

Wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan ***2 (dua)*** *sasaran/target* yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yaitu ***(1)*** *Meningkatnya Nilai Tambah Produksi;* ***(2)*** *Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.*

Sebagai penjabaran dari sasaran tersebut dapat ditentukan arah tujuan dari perangkat daerah. Tujuan ini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2019-2024 yang menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan**.**

Dalam rangka implementasi dari RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menyusun sasaran strategis melalui Rencana Strategis (Renstra). Terdapat 5 (lima) ***Sasaran Strategis*** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024 yang diturunkan dari 2 (dua) tujuan yaitu urusan bidang perindustrian dan urusan bidang perdagangan serta 1 (satu) penunjang urusan pemerintahan, sebagai berikut :

Tujuan 1 (urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian) :

Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan sasaran strategis :

1. ***(1)***...Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan, dengan indikator Kinerja Utama (IKU) *"Nilai PDRB Industri Pengolahan"*

Tujuan 2 (urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan) :

Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan sasaran strategis :

1. ***(2)***...Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *"Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah"*
2. ***(3)*** …Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKU) *"Persentase pertumbuhan net ekspor non migas"*
3. ***(4)***...Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *"Persentase Peningkatan Barang yang Diawasi dan Sertifikasi Barang Beredar"*

Penunjang urusan Pemerintahan :

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, *dengan sasaran strategis :*

1. ***(5)***...Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *"Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"*

Gambar 1.2 : Keterkaitan RPJMD dengan Renstra 2019-2024

Selanjutnya, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh 20 (dua puluh) unit kerja yang terbagi menjadi 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang dan 14 (empat belas) UPT yang tersebar di beberapa Kab./Kota dengan wilayah kerja yang meliputi 38 (tiga puluh delapan) Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Timur.

1.5 PETA PROSES BISNIS

Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

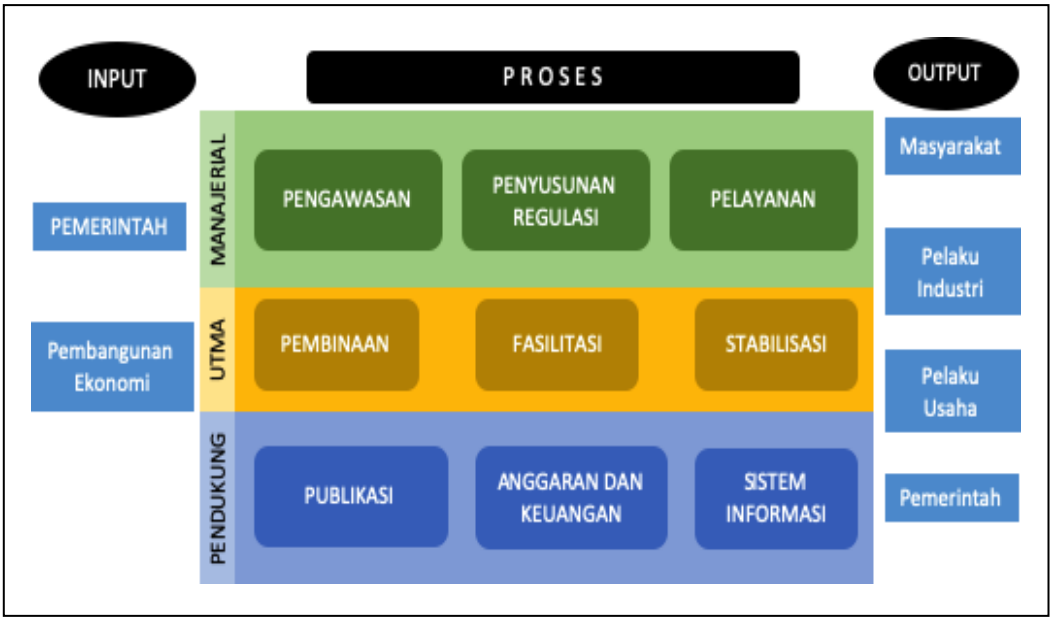

Gambar 1.3 : Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

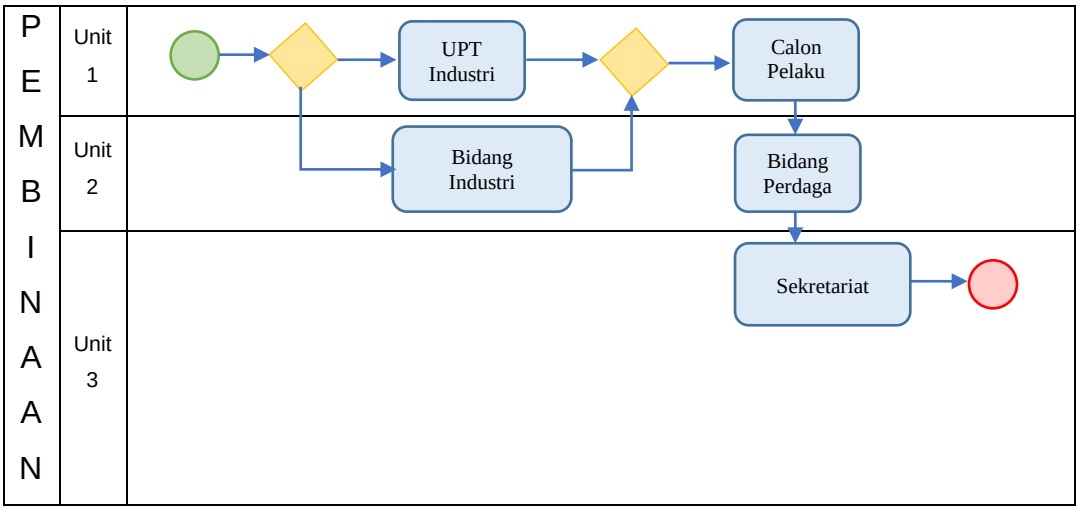

Gambar 1.4 : Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Utama

Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja Dinas yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung.

Mengacu pada dokumen rencana strategis bahwa tujuan dan keluaran utama yang ingin dicapai oleh organisasi adalah meningkatkan

kontribusi sektor industri pengolahan dan peneyelenggaraan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Sehingga proses pembinaan, fasilitasi dan stabilisasi sebagai proses utama kepada pemangku kepentingan berperan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal maupun internal instansi pemerintah. Selain itu, pada level ini mempunyai pengaruh secara langsung terhadap keberhasilan organisasi agar bisa memberikan respon secara langsung terhadap permintaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan.

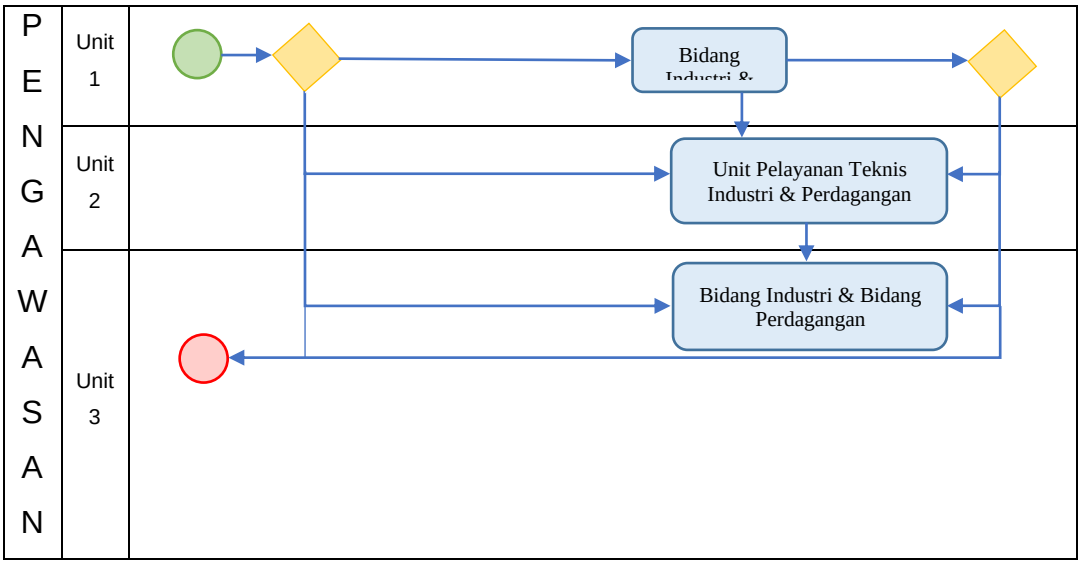

Gambar 1.5 : Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Manajerial

Pelaku industri mendapat pembinaan (pendampingan) secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu oleh UPT Industri untuk meningkatkan kualitas mutu produk, wawasan atau *skill* dalam penguasaan peralatan maupun pengetahuan bahan/material. Yang kemudian menjadi masukan pada bidang industri terkait untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan pengembangan industri sesuai komoditi. Kemudian bidang perdagangan terkait bisa memberikan fasilitasi even/penyelenggaraan promosi.

Sedang pada proses manajerial meliputi pengawasan, penyusunan regulasi dan pelayanan. Proses ini berperan dalam mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna/pemangku kepentingan internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

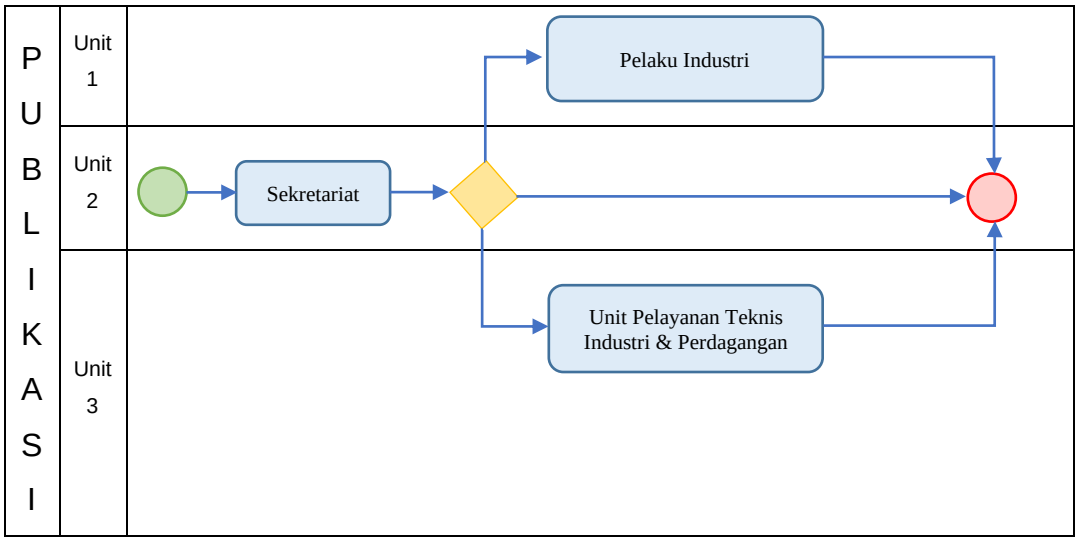

Gambar 1.6 : Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Pendukung

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sehingga secara langsung dapat melakukan pengawasan rutin kepada Bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Sedang pada proses pendukung, tidak memiliki kaitan secara langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal dan memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Fungsi ini secara umum dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai pintu utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, seperti *official*

website, media sosial resmi serta bentuk informasi lain yang sifatnya informatif kepada masyarakat dan menggambarkan eksistensi dinas secara umum.

1.6 RINGKASAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 90,50 atau predikat AA. Penilaian tersebut menunjukkan memuaskan dalam memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Tahun 2020

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan kinerja	30%	28,3	29,45
b.	Pengukuran kinerja	25%	22,50	23,44
c.	Pelaporan kinerja	15%	13,56	14,33
d.	Evaluasi Kinerja	10%	8,77	7,85
e.	Pencapaian Kinerja	20%	17,11	15,44
Nilai Hasil Evaluasi		100%	**90,24**	**90,50**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**AA (Sangat Memuaskan)**	**AA (Sangat Memuaskan)**

Selain memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya.

Uraian singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruh ASN di semua level. Hali yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan terfcapainya kinerja;
4. Perlu penjelasan komprehensif pada bagian cascading kinerja secara simultan terkait agregasi dari capaian kinerja Pemerintah Kab./Kota, APBN, CSR dan *stakeholder* lainnya;
5. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berkala belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik terutama pada UPT dan Cabang Dinas.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya berkelanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Perlu dilakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan baik output/outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya;
3. Penyusunan *cascading* kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian sasaran;
4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan *cascading* kinerja dengan peta proses

bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait;

5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus baik pada instansi utama maupun unit kerja sehingga dapat meminimalisir kesenjangan manajemen kinerja serta meminimalisir kesalahan dengan pengembangan aplikasi manajemen kinerja;
6. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada RPJMD 2019-2024 disebutkan bahwa agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Pada *misi pertama* "*Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor maupun antar Wilayah"* mempunyai tujuan yang terkait secara langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah ***Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah*** yang ditetapkan dengan *indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini (%).* Kemudian ditetapkan sasaran dari RPJMD yang menjadi dasar dari ***tujuan*** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. *Meningkatnya Nilai Tambah Produksi*
2. *Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan*

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2019-2024 dapat dijabarkan kedalam 2 (dua) tujuan dinas, sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. **Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan *(Sasaran Strategis 1)***

   Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

   Nilai PDRB Industri Pengolahan... (1)

   Sasaran strategis ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu :

   1. *Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*

2. *Program Pengendalian Izin Usaha Industri*
3. *Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*

Tujuan 2 : Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. **Meningkatnya net-ekspor Perdagangan Dalam Negeri *(Sasaran Strategis 2)***

   Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

   Persentase Pertumbuhan net-ekspor antar Daerah... (2)

   Sasaran strategis dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu :

   1. *Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.*
   2. *Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.*
   3. *Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.*
   4. *Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.*

2. **Meningkatnya net-ekspor Perdagangan Luar Negeri *(Sasaran Strategis 3)***

   Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

   Persentase Pertumbuhan net-ekspor non migas… (3)

   Sasaran strategis dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu :

   1. *Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.*
   2. *Program Pengembangan Ekspor.*

3. **Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan *(Sasaran Strategis 4)***

   Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

   Persentase Peningkatan Barang Yang Diawasi dan Sertifikasi Barang Beredar... (4)

   Sasaran strategis dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu :

   1. *Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.*

Supporting **: Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

4. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah *(Sasaran Strategis 5)***

   Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

   Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah... (5)

   Sasaran strategis dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu :

   1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.*

2.2 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjamin tercapaianya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 5 (lima) sasaran strategis. Kelima sasaran strategis tersebut sebagai berikut : (1) Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan; (2) Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri; (3) Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar

Negeri; (4) Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; (5). Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 2.1 : Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan RENSTRA 2019-2024 Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan

TUJUAN RPJMD	**Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah**	
SASARAN RPJMD **TUJUAN RENSTRA**	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan.	2. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri. 3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri. 4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
	5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. *(Supporting)*	

Tabel 2.2 Tujuan, Indikator dan Target RPJMD 2019-2024

No.	Tujuan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya nilai tambah produksi	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan (%)	7,71	7,79	7,87	7,95	9,03
2	Meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	6,39	6,44	6,49	6,54	6,59

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL			TARGET CAPAIAN		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3		4			
1	Nilai PDRB industri pengolahan (Triliun Rp)	650,22	677,43	690,98	704,80	718,90	733,27
2	Persentase pertumbuhan net ekspor non migas (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

3	Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah (%)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
4	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang bereda (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Nilai sistem akuntabiltas kinerja instansi pemerintah	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80	87,00

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikatator Kinerja Utama	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	1. Nilai PDRB industri pengolahan	Rp. Trilyun	690,98
2. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri	1. Pertumbuhan net ekspor non migas	%	2
3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri	1. Pertumbuhan net-ekspor non migas	%	7
4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	%	2
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		86,40

Scan perkin 2021 perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE., MT.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19621115 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
1	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	1. Nilai PDRB industri pengolahan	696,98	Triliun Rupiah
2	Meningkatnya Net-ekspor Perdagangan Luar Negeri	2. Pertumbuhan net-ekspor non migas	2	%
3	Meningkatnya Net-ekspor Perdagangan Dalam Negeri	3. Pertumbuhan net-ekspor antar daerah	7	%
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4. Peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	2	%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	88,4	

NO.	PROGRAM	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	307.516.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	260.830.300	APBD
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	1.587.746.000	APBD
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp	250.000.000	APBD
5	Program Standardisasi Perlindungan Konsumen	Rp	2.014.961.000	APBD
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	6.244.107.700	APBD
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	11.059.815.500	APBD
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	50.000.000	APBD
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	100.000.000	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	90.793.780.500	APBD
	TOTAL	Rp	112.668.557.000	

Surabaya, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE., MT
Pembina Utama Madya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Arah kebijakan pembangunan sektor industri dalam Renstra 2019-2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam janji politik Nawa Bhakti Satya mencakup hal-hal pokok sebagai berikut (tabel 3.1) :

Tabel 3.1 : Program/Kegiatan Penunjang Arah Pencapaian Kinerja

NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millennial Job Center	Peningkatan daya saing IKM melalui dukungan MJC	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Program Vocational	Fasilitasi kerjasama IKM/SMK dengan Industri Besar	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	Pengembangan Pusat Agropolitan	Fasilitasi, Pembinaan dan Diversifikasi Produk Agro	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	Communal Branding	Fasilitasi pembentukan Communal Branding	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	One Village One Product One Corporate	Pengembangan dan Pembinaan OVOP di Kab/Kota	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	One Pesantren One Product	Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Perdagangan bagi Pesantren	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Perdagangan Antar Pulau	Fasilitasi Promosi, Penguatan KPD dan Misi Dagang	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut (tabel 3.2) :

Tabel 3.2 : Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2021

Tujuan 1 : **Meningkatnya Nilai Tambah Produksi** ***Indikator Tujuan :*** *Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan*							
Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan**							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**Target 2021**	**Realisasi/Capaian**					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	690,98	536,47	586,25	651,12	711,30	705,79	754,04
Tujuan 2 : **Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan** ***Indikator Tujuan :*** *Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*							
Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri**							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**Target 2021**	**Realisasi/Capaian**					
		2016	2017	2018	2019	2020	**2021**
Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah	7,00	173,08	27,90	82,51	-7,16	-26,41	64,13
Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri**							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**Target 2021**	**Realisasi/Capaian**					
		2016	2017	2018	2019	2020	**2021**
Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	2,00	173,25	-76,97	-402,03	-127,27	235,96	-106
Sasaran Strategis 4 : **Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**Target 2021**	**Realisasi/Capaian**					
		2016	2017	2018	2019	2020	**2021**
Persentase Peningkatan Barang Yang Diawasi dan Sertifikasi Barang Beredar	2,00	-	-	8,60	14,82	-53,86	5,30
Penunjang Urusan Pemerintahan : *Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*							
Sasaran Strategis 5 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**Target 2021**	**Realisasi/Capaian**					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86,40	85,65	86,17	86,17	90,00	90,24	**90,50**

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA 2021

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis, adapun analisa dari ke-lima sasaran strategis untuk mencapai 2 (dua) tujuan dan 1 (satu) penunjang urusan pemerintahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Misi pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Timur, yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah, akan diuraikan *sebagai berikut :*

SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatnya nilai tambah produksi maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yakni meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Sasaran Strategis 1 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi/Capaian						% Capaian 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	**690,98**	536,47	586,25	651,12	711,30	705,79	**754,04**	**109,13**

Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	690,98	705,79	754,04

Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi 2021	(%) Tingkat Kemajuan
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	733,27	754,04	102,83%

Tabel 3.6 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021		Ket. (+/-)
		Jatim	Nasional	
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	**Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)** ****) Nas.: PDB sektor industri pengolahan***	754,04	*3.266,9*	Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jatim tahun 2021 mencapai Rp. 754,04 trilyun memberikan kontribusi sebesar 23,08% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp.3.266,9 trilyun pada tahun yang sama.
	Pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan **) Nas.: PDB sektor industri pengolahan*	3,36	3,39	PDB Nasional: (ADHB) Rp.3.266,9T (2021) Rp.3.068,0T (2020) PDRB Jatim: (ADHB) Rp.705,76T (2020) Rp.754,04T (2021)
	Persentase kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB **) Nas.: PDB sektor industri pengolahan*	30,73	*19,25*	Total PDB Nasional: Rp.10.722,4T Total PDRB Jatim: Rp.1.610,41T

Tabel 3.7 : Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 1 *(Rp)*	Total Anggaran Belanja *(Rp)*	% Anggaran
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	11.209.815.500,-	9.542.682.555	86,28%

Tabel 3.8 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PDRB Sektor	Nilai PDRB Industri	Rp. 690,98 T.	Rp. 754,04 T	109,13%
		Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian

Industri Pengolahan	Pengolahan	11.209.815.500,-	9.542.682.555	86,28%

Tabel 3.0.9 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	109,13%	86,28%	22,85%

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2021 (III) adalah 30,73%. Atau sebesar Rp. 754,04 trilyun, dari total PDRB yang tercatat sebesar Rp. 2.453,63 trilyun dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 690,98 trilyun. Sehingga persentase capaiannya sebesar 109,13%.

Grafik 3.1 : Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Jatim terhadap Nasional th. 2016-2021

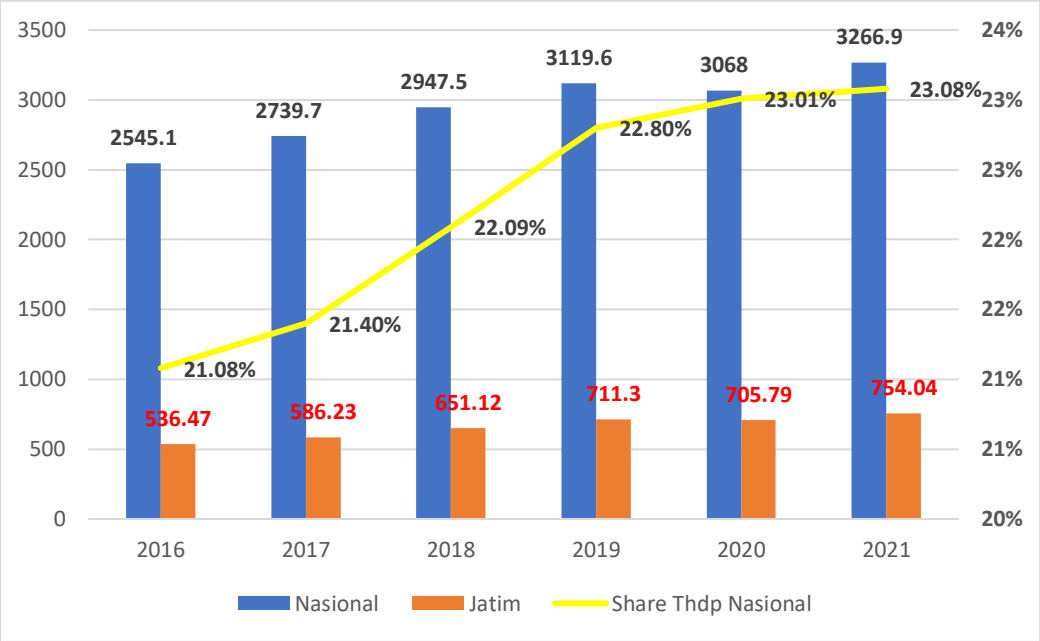

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara komulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai Rp. 754,04 trilyun dengan memberikan kontribusi sebesar 23,08% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 3.266,9 trilyun pada tahun yang sama, adapun perbandingannya kinerja dapat dilihat pada grafik 3.1. Sedangkan pada PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 754,04 trilyun dibanding tahun

sebelumnya sebesar Rp. 705,76 trilyun. Sehingga laju pertumbuhan pada tahun 2021 dapat dihitung meningkat sebesar 3,36% dari tahun sebelumnya, namun masih dibawah nasional yang menunjukkan pelambatan laju sebesar 3,39%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.2 bahwa industri pengolahan baik Nasional maupun Jawa Timur mengalami peningkatan laju yang cukup signifikan di tahun 2021.

Adapun besaran PDRB ADHB kategori industri pengolahan pada tahun 2017 sebesar Rp.586T, tahun 2018 sebesar Rp.651T, tahun 2019 sebesar Rp.711T, tahun 2020 sebesar Rp.705T dan tahun 2021 sebesar Rp 754,04T.

Grafik 3.2 : Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri th. 2016-2021

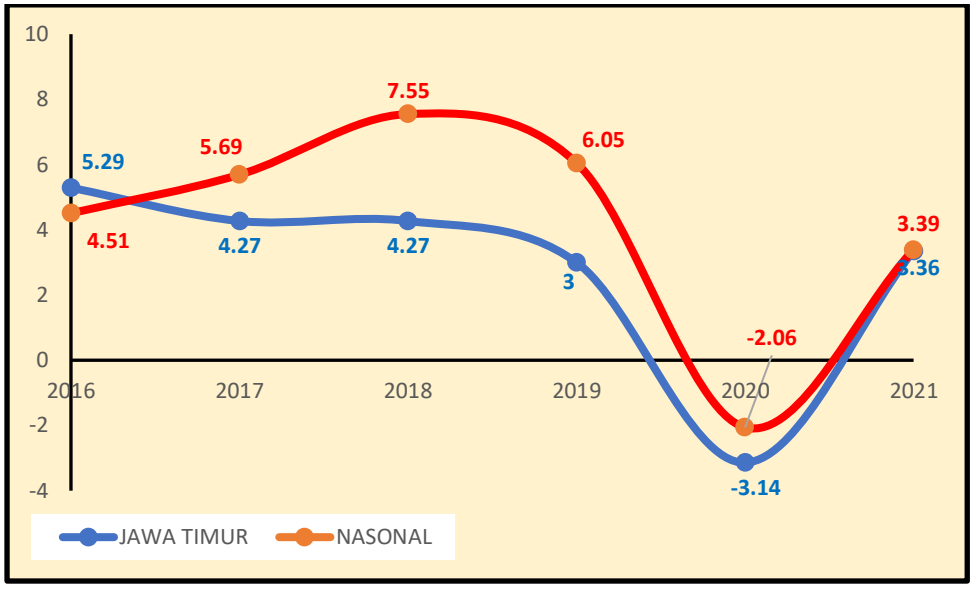

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri. Beberapa sub sektor industri pengolahan tercatat mampu menunjukkan peningkatan seperti Industri makanan dan minuman dan Industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tetap tumbuh positif karena ditopang naiknya hasil produksi pertanian dan upaya masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan.

Grafik 3.3 : Perkembangan Pendayagunaan Industri di Jawa Timur

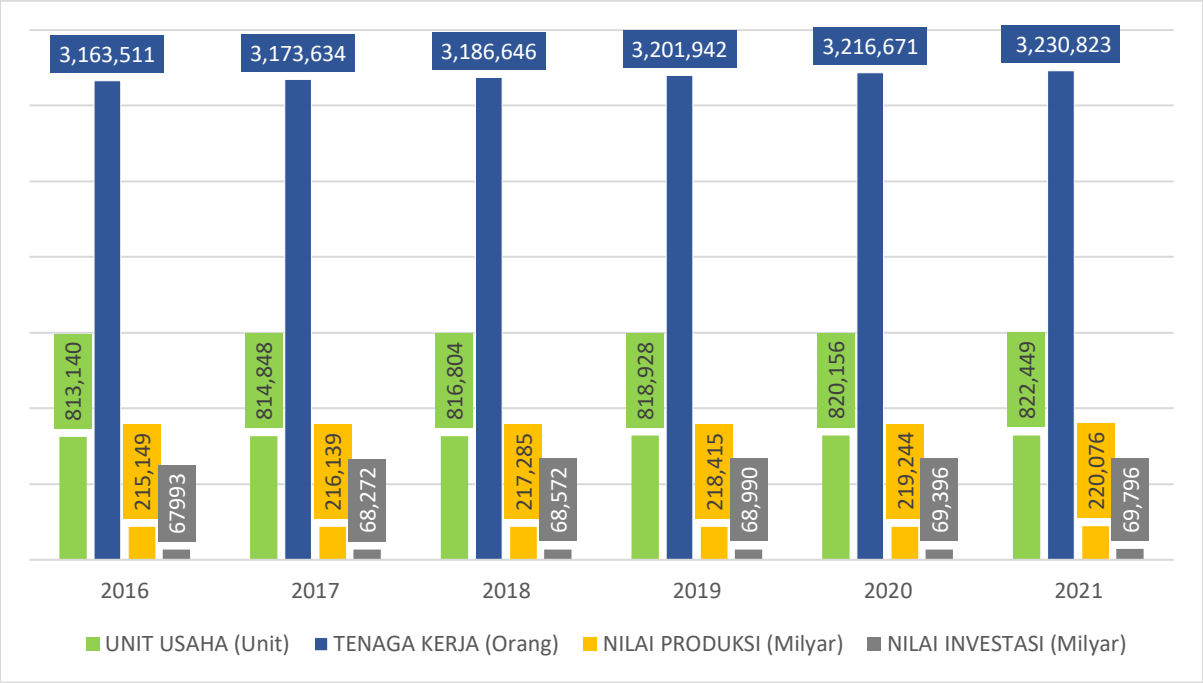

Sumber : Disperindag Prov. Jatim, 2021 (diolah)

Terkait capaian tersebut maka dapat diuraikan gambaran kondisi industri di Jawa Timur baik dari unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi maupun nilai investasi pada grafik 3.3. Bahwa unit usaha meningkat sebesar 0,28%. Begitu pula dengan tenaga kerja meningkat 0,44%, nilai produksi meningkat 0,38% dan nilai investasi terjadi peningkatan sebesar 0,58% meskipun jumlahnya tidak signifikan.

Jika dikaitkan dengan pengeluaran perkapita per bulan, pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran di Jawa Timur meningkat dari Rp.1.064.382,- menjadi Rp.1.113.002,- atau dapat dikatakan pengeluaran per kapita per bulan penduduk Jawa Timur naik sebesar 4,57% dibandingkan tahun 2020. Data BPS mencatat bahwa pengeluaran penduduk meningkat sebesar 4,57% paling banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 50,12%, sedikit meningkat jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 49%. Sedang untuk memenuhi kebutuhan non makanan persentasenya sebesar 49,88% ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 51%. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan Jawa Timur khususnya menyebabkan banyak penduduk yang lebih mementingkan kebutuhan makanan dibanding non makanan.

Tabel 3.10 : Ekspor Non Migas Tahun 2021 *(US$ Milyar)*

No	EKSPOR NON MIGAS	Jan-Des 2020	Jan-Des 2021	PERTUMBUHAN (%)
1.	Pertanian	1,67	1,70	1,84
2.	**Industri**	**16,55**	**19,54**	**18,05**
3.	Pertambangan dan Lainnya	0,49	0,62	25,38
Total Ekspor Non Migas		18,27	21,3	16,59

Sumber : BPS, 2021

Peranan industri pengolahan sangat mendominasi kinerja ekspor non migas Jawa Timur dengan mencatatkan nilai ekspor non migas selama tahun 2021 sebesar US$ 19,54 milyar dengan memberikan kontribusi sebesar 88,41% dari total nilai ekspor non migas yang nilainya sebesar US$ 21,3 milyar. Terjadi peningkatan sebesar 18,05% jika dibanding tahun 2020 yang nilainya mencapai US$ 16,55 milyar (tabel 3.10). Adapun komoditi ekspor non migas (tabel 3.11) pada industri pengolahan terdiri dari industri pengolahan kayu, barang dari kayu; industri tembaga; industri lemak, minyak hewan/nabati; industri periasan/ permata; indsutri ikan dan udang; industri bahan kimia organik; industri berbagai produk kimia; industri kertas karton; industri daging dan ikan olahan; industri perabot, penerangan rumah.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pertama, yakni meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan diperlukan upaya untuk menambah daya saing produk bagi pelaku industri di Jawa Timur. Maka standardisasi produk dan Kekayaan Intelektual pada sektor industri pengolahan menjadi sangat penting bagi pelaku industri, diantaranya : pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri dan teknologi kreatif tampak pada tabel 3.11, berikut :

Tabel 3.11 : 10 Komoditi Utama Ekspor Non Migas Tahun 2021 *(US$ Milyar)*

NO	KELOMPOK KOMODITI	NILAI Jan-Des 2020	NILAI Jan-Des 2021	PERTUM-BUHAN (%)	PERAN (%)
1.	Kayu, barang dari kayu	1,40	1,82	30,44	9,72
2.	Tembaga	1,28	1,90	48,76	9,33
3.	Lemak, minyak hewan/ nabati	1,39	2,13	53,33	8,89
4.	Perhiasan/permata	2,45	1,58	-35,59	6,53
5.	Ikan dan Udang	1,12	1,17	4,45	6,05
6.	Bahan Kimia Organik	0,75	1.06	41,90	5.06
7.	Berbagai produk kimia	0,59	0,90	52,79	4,99
8.	Kertas/Karton	0,87	0,91	4,60	4,26
9.	Daging dan ikan olahan	0,78	0,90	14,83	4,26
10.	Perabot, penerangan rumah	0,61	0,83	36,29	4,18
Total 10 Kelompok Komoditi		11,24	13,21	17,51	63,27

NO	KELOMPOK KOMODITI	NILAI Jan-Des 2020	NILAI Jan-Des 2021	PERTUM-BUHAN (%)	PERAN (%)
Lainnya		7,03	8,09	15,12	36,73
Total Ekspor Non Migas		**18,27**	**21,30**	**16,59**	**100,00**

Sumber : BPS Jatim, 2021

Selanjutnya dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan industri di Jawa Timur, Dinas Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) telah mempertegas keseriusan dalam mewujudkan industrialisasi di Jawa Timur. Adapun visi RPIP adalah "Jawa Timur sebagai *Leading Smart Industrial Province*" dan mengusung 3 (tiga) misi, yakni menguatkan dan memantapkan struktur industri, meningkatkan daya saing industri yang berbasis pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa pada tahun 2020 keberadaan RPIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur sudah menunjukkan indikator 100% (tabel 3.12).

Tabel 3.12 : Capaian Target Tahapan Penyelesaian RPIP 2021

No	TAHAPAN RPIP	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Tersusunnya naskah akademik	30	*Bukti :* Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) *Nilai Akumulasi :* 100%
2.	Tersusunnya Draft Raperda RPIP	20	
3.	Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian	25	
4.	Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda	15	
5.	Penetapan Perda RPIP	10	

Sumber : Disperindag Prov. Jatim *(diolah)*

Tabel 3.13 : Fasilitasi Standardisasi Produk Industri di Jawa Timur th. 2016-2021

No.	FASILITASI STANDARDISASI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Batik Mark	40	40	10	22	0	5
2.	HACCP	0	2	4	1	0	0
3.	Sertifikat Halal	187	200	130	55	0	39
4.	ISO 9001	44	46	25	4	0	0
5.	Barcode	15	21	10	10	6	5
6.	SPPT-SNI	3	23	9	6	4	3
7.	Uji Nutrisi	181	215	160	77	4	55
8.	Uji Produk	0	62	18	14	4	0

No.	FASILITASI STANDARDISASI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Bimbingan ISO 9001	60	27	15	2	0	2
10.	Bimbingan Upgrading ISO 9001	0	0	6	0	0	0
11.	Bimbingan HACCP	0	0	3	3	1	0
12.	Bimbingan GKM	0	0	5	0	26	0
13.	Bimbingan SOP	25	25	7	0	0	0
14.	Jasa Desain Industri & TK	0	10	0	0	650	774
Total Standardisasi		*299*	*743*	*555*	*671*	*695*	*883*
No.	**FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.	Merek	735	1012	855	926	184	439
2.	Cipta	30	30	13	5	0	0
3.	Desain Industri	-	-	-	-	252	0
Total Kekayaan Intelektual		*765*	*1312*	*868*	*931*	*436*	*439*
TOTAL FASILITASI		***1.064***	***2.055***	***1.423***	***1.602***	***1.131***	***1.322***

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim (diolah)

Dukungan standardisasi terhadap pelaku industri di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif yang berlokasi di Surabaya dan Malang (tabel 3.13). Adapun capaian kinerja dari 5 (lima) UPT Industri komoditi di lingkungan industri (sentra) yang tersebar di lima kota di Jawa Timur (tabel 3.14) diantaranya, UPT Industri Logam dan Perekayasaan, UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit, UPT Industri Kayu dan Produk Kayu serta UPT Aneka Industri dan Kerajinan.

Tabel 3.14 : Capaian Kinerja Pelayanan UPT Industri

No	UPT Industri	Lokasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Logam dan Perekayasaan	Sidoarjo	2.198	2.603	2.707	2.163	1.145	1.277
2.	Makanan, Minuman dan Kemasan	Sidoarjo	4.236	6.042	5.050	4.715	2.926	1.090
3.	Kulit dan Produk Kulit	Magetan	2.306	872	1.215	1.755	1.529	1.488
4.	Kayu dan Produk Kayu	Pasuruan	1.677	1.565	1.706	2.155	2.118	1.612
5.	Aneka Industri dan Kerajinan	Sidoarjo	1.034	1.047	1.065	1.088	952	341

Sumber : Disperindag, 2021 (diolah)

Sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah urusan pilihan perindustrian, keberadaan industri besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Mengacu pada Permenperin No.64 Tahun 2016, bahwa

klasifikasi industri besar di Jawa Timur berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja (≥ 20 orang) dan nilai investasi (≥Rp.15.000.000.000) diperoleh data pertambahan industri besar sebagai berikut;

$$= \left(\frac{(Jumlah\ Industri\ Besar\ th.\ 2021\ - Jumlah\ Industri\ Besar\ th.\ 2020)}{Jumlah\ Industri\ Besar\ th.\ 2020}\right) x100\%$$

$$= \left(\frac{(1.233 - 1.231)}{1.231}\right) x100\% \quad = 0{,}16\%$$

Tabel 3.15 : Perkembangan Industri Besar di Jawa Timur

No.	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	*Unit Usaha*	*Unit*	*1.147*	*1.181*	*1.201*	*1.228*	*1.231*	***1.233***
b.	Tenaga Kerja	Org	373.294	379.884	381.123	382.632	384.392	**386.083**
c.	Nilai Produksi	Milyar Rp	84.769	85.159	85.393	85.837	86.249	**86.577**
d.	Nilai Investasi	Milyar Rp	20.534	20.652	20.757	20.904	21.027	**21.148**

Sumber : Disperindag, 2021 (diolah)

Grafik 3.4 : Perkembangan Industri Besar di Jawa Timur

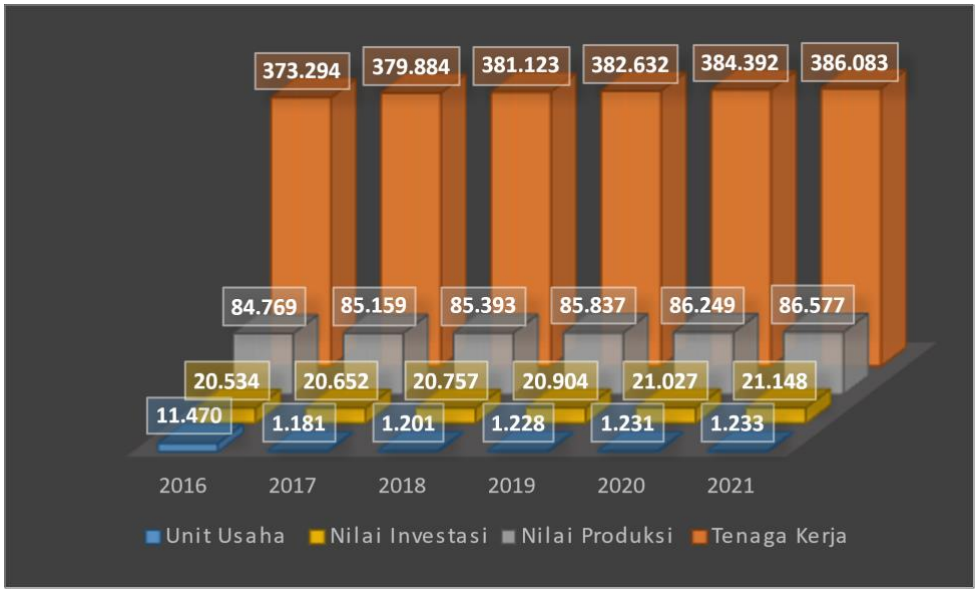

Pada tahun 2021 *sasaran strategis pertama* didukung dengan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan melalui 10 unit kerja, sebagai berikut :

1. Bidang Industri Agro
2. Bidang Industri Non Agro
3. Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan
4. UPT PMPI-TK Surabaya

5. UPT PMPI-TK Malang
6. UPT Industri Logam Mesin dan Perekayasaan Sidoarjo;
7. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Sidoarjo;
8. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
9. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan;
10. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya.

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
   b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
   c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
   d. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

   Pagu anggaran sebesar Rp. 11.059.815.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.542.682.555,- atau 86,28%.

   Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

   Indikator program yaitu prosentase peningkatan unit usaha industri dan ditarget sebesar 1%. Tahun 2021 unit usaha industri sebanyak 822.449 unit usaha atau meningkat sebesar 0,28% dibanding tahun sebelumnya yaitu 820.156 unit usaha. Pandemi covid-19 yang masih berjalan di sepanjang tahun 2021 menyebabkan peningkatan industri belum maksimal serta adanya pembatasan kegiatan yang menyebabkan sektor industri tidak dapat optimal dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan secara realisasi anggaran dimana penyerapan hanya sebesar 86,28% dimana terdapat kegiatan hibah yang tidak dapat terserap penuh karena terkendala penetapan regulasi. Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar RP. 48.176.220,- atau 96,35%.

Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

Indikator kinerja pada program ini adalah prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri dengan target sebesar 10%, dimana pada tahun 2021 terdapat kegiatan pengendalian izin usaha industri yaitu verifikasi teknis izin usaha industri sebanyak 20 rekomendasi izin atau meningkat 53,85% dari tahun sebelumnya yang sejumlah 13 rekomendasi izin. Secara keseluruhan kegiatan/sub kegiatan pada program ini terlaksana dengan baik sesuai rencana.

3. Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   a. *Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*
   b. *Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas*
   c. *Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas*

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.016.275,- atau 98,02%.

Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase peningkatan Industri yang telah terdaftar dalam SIINas dengan target sebesar 20%. Sepanjang tahun 2021, jumlah industri yang telah terdaftar dalam SIINas adalah sebanyak 4.719 industri mengalami peningkatan sebesar 16,35% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 4.056 industri. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk

mendorong peningkatan capaian tersebut diantaranya sosialisasi implementasi OSS dan SIINas pada pelaku usaha indsutri. Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan/sub kegiatan pada program ini dapat terlaksana dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri

Untuk mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yakni meningkatnya PDRB sektor perdagangan. Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : *Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah,* yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.16 : Sasaran Strategis 2 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi/Capaian					(%) Capaian 2021
		2017	2018	2019	2020	***2021***	
Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah (%)	***7***	27,90	82,51	-7,16	*-26,41*	*64,13*	***1.068***
Nilai Net Ekspor Antar Daerah		92,26	175,68	163,10	*120,03*	***197,02***	

Tabel 3.17 : Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi 2021	(%) Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah (%)	10	64,13	641,3

Tabel 3.18 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam	Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah (%)	7,00	-7,16	64,13

Negeri				

Tabel 3.19 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021		Ket. (+/-)
		Jatim	Nasional	
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri	**Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah (%)**	**64,13**	-	*Tidak ada pembanding Nasional*
	Indikator kinerja pendukung : - Pertumbuhan sub sektor perdagangan - Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim	7,83 18,45	4,65 12,97	PDRB sub sektor perdagangan (ADHB): Rp.452,72T (2021) Rp.412,56T (2020) PDB sub sektor perdagangan (ADHB): Rp.1.450,2T (2021) Rp.1.385,8T (2020) Total PDRB: Rp.2.480,63T Total PDB: Rp.11.118,9T

Tabel 3.20 : Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 2 *(Rp)*	Total Anggaran Belanja Langsung *(Rp)*	% Anggaran
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	8.400.000.000,-	21.874.776.500,-	38,40%

Tabel 3.21 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. 425 T.	Rp. 452,72 T.	106,52 %
		Anggaran		
		Alokasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Capaian**
		8.400.000.000,-	7.957.602.357,-	94,73%

Tabel 3.22 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi

Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	106.52%	94,73 %	11.79%

Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan menunjukkan pada tahun 2021 angka Rp. 452,72 trilyun atau diatas target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 425 trilyun sehingga persentase capaiannya sebesar 106,52 %. Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara komulatif nilai PDRB ADHB sektor perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 20,57% terhadap PDB ADHB sektor perdagangan Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 2.200,5 trilyun pada tahun yang sama, adapun perbandingan kinerja dapat dilihat pada grafik 3.4.

Grafik 3.5 : Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor Jatim terhadap Nasional th. 2016-2021

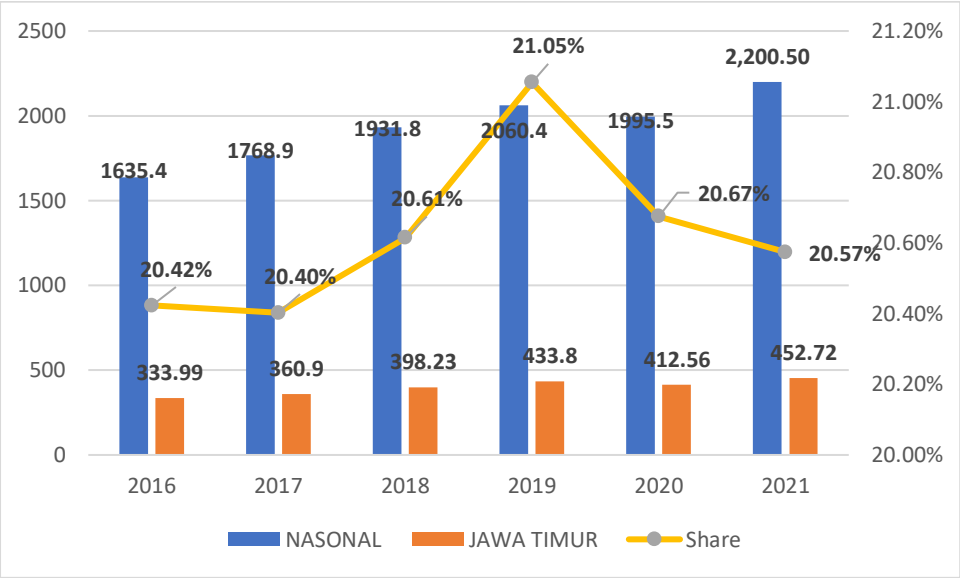

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Sedang pada PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 312,31 trilyun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 289,80 trilyun. Sehingga laju pertumbuhan pada tahun 2021 dapat dihitung meningkat sebesar 7,76% dari tahun sebelumnya, diatas angka nasional yang menunjukkan pelambatan laju sebesar 4,65%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.5 bahwa sektor perdagangan baik Nasional maupun Jawa Timur mengalami peningkatan laju yang cukup signifikan di tahun 2021 Hal ini terutama

disebabkan oleh perbaikan kinerja konsumsi di hampir seluruh provinsi di Indonesia seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Grafik 3.6 : Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan th. 2016-2021

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Net Ekspor perdagangan antar wilayah tahun 2021 mengalami pertumbuhan 64,13 persen atau 94,99 triliyun rupiah, dimana pada tahun 2021 nilai net ekspor antar wilayah sebesar 197,02 trilyun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 120,03 trilyun rupiah. Nilai peningkatan pertumbuhan ekspor terjadi pada hampir keseluruhan komoditas. Berikut disajikan kinerja net ekspor perdagangan dalam negeri tahun 2017-2021 sebagaimana garfik 3.6.

Grafik 3.6 : Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri tahun 2017-2021 *(Rp. Trilyun)*

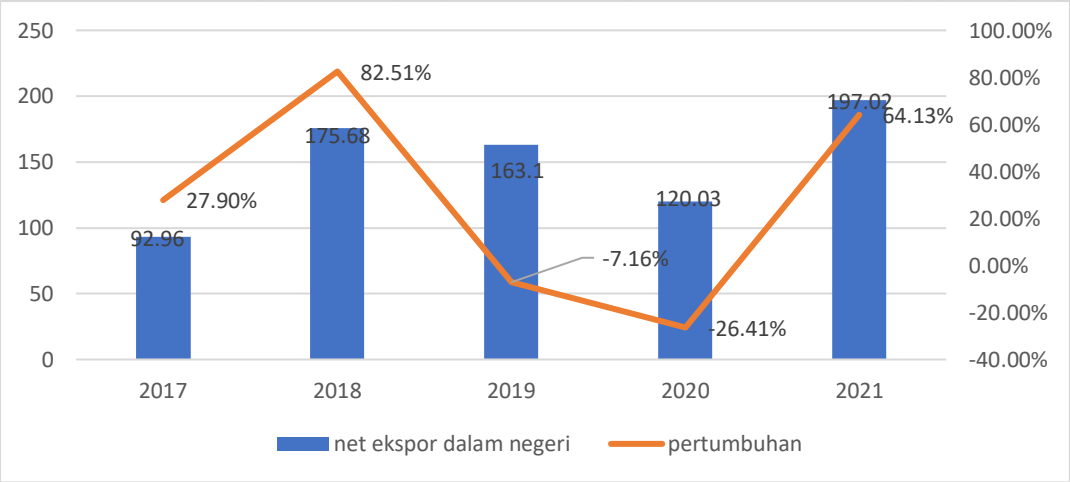

Sumber : BPS, (diolah)

Selama tahun 2021 neraca perdagangan luar negeri barang dan jasa di Jawa Timur defisit sebesar Rp. 88,17 trilyun sedang perdagangan antar pulau surplus sebesar Rp. 236,11 trilyun. Sehingga total net perdagangan dalam negeri dibanding luar negeri menjadi surplus sebesar Rp. 151,94 trilyun (tabel 3.23).

Tabel 3.23 : Kinerja Perdagangan Barang dan Jasa th. 2017-2021

KINERJA PERDAGANGAN	Tahun | Rp. Trilyun				
	2017	2018	2019	2020	2021
EKSPOR	975,07	1.110,57	1.139,17	-	-
- Luar Negeri	*284,94*	*288,13*	*279,58*	*279,58*	*339,29*
- Antar Daerah	*690,13*	*822,44*	*859,59*	-	-
IMPOR	878,81	1.012,92	1.042,00	-	
- Luar Negeri	*353,17*	*401,03*	*368,12*	*368,12*	*423,46*
- Antar Daerah	*525,64*	*611,89*	*673,88*	-	-
TOTAL (Ek – Im)	1.851,88	97,56	97,17	-	-
- Net Ek-Im LN	-68,23	-112,91	-88,54	-88,54	-84,17
- Net Ek-Im DN	164,49	210,54	171,84	185,70	236,11
T O T A L (NET Eks-Im)	96,26	97,61	97,16	97,16	151,94

Sumber : BPS, 2020 (diolah)

Pada tahun 2021 *sasaran strategis kedua* didukung dengan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 unit kerja, yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :
   a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor.
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegitan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
   b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

   Pagu anggaran sebesar Rp. 307.516.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 285.586.530,- atau 92,87%.

*****Pada Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang diampu oleh Bidang Perdagangan Internasional sebesar Rp. 150.000.000,- yang mana masuk dalam Sasaran Strategis 3.

Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

Indikator program ini adalah jumlah Ijin yang diterbitkan dengan target sebanyak 130.062 ijin dimana pada tahun 2021 ini terealisasi sebanyak 144.858 ijin atau sebesar 111,37%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 dokumen rekomendasi SIUP (perdagangan dalam negeri), 144.754 ijin SKA, dan 101 ijin API (perdagangan internasional). Meskipun capaian dari program ini tercapai dengan baik, namun secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan mengingat tujuan utama dari program tersebut adalah peningkatan ekspor dan pengendalian impor karena sampai saat ini angka ekspor Jawa Timur masih defisit terhadap angka impor.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas, dengan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:
   a. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
   b. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

   Pagu anggaran sebesar Rp. 260.630.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 247.495.424,- atau 94,96%.

   Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

   Indikator pada program ini adalah pertumbuhan sarana distribusi perdagangan dengan target sebesar 1% dimana dalam pelaksanaanya program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas. Pusat distribusi Jawa Timur yaitu Puspa Agro dimana telah dikelola oleh PT. JGU yang mana juga telah dilaksanakan koordinasi dalam upaya pengelolaannya agar bisa termanfaatkan dengan optimal.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor.

b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

   1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota.
   2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

   1. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi.
   2. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi.
   3. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.
   4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.587.746.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.550.288.653,- atau 97,64%.

Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

Indikator pada program ini adalah tingkat inflasi bahan makanan dengan target sebesar 2% dan terealisasi sebesar 3,56%. Beberapa komodistas yang dipantau mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sehingga menyebabkan rata-rata inflasi Jawa Timur di tahun 2021 tersebut melebihi terget. Namun demikian, beberapa kebijakan strategis untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan harga pada beberapa komidtas yang naik seperti cabe keriting, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, dan minyak curah. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengadakan operasi pasar yang mana didalamnya ada beberapa rangkaian kegiatan diantaranya melakukan survey ketersediaan barang pada

tingkat produsen, kendala-kendala yang menyebabkan naiknya harga, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.
   b. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
      1. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
      2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

   Pagu anggaran sebesar Rp. 6.244.107.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.874.231.750,- atau 94,08%.

   Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

   Indikator pada progam ini adalah jumlah pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan target sebanyak 90 pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu pelaksanaan promosi produk dalam negeri dan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan teknis pada program ini berupa misi dagang, pameran, pasar murah, dan pasar meriah yang mana telah terealisasi sebanyak 90 pelaku usaha yang ikut terfasilitasi penggunaan dan pemasaran produknya. Dampak nyata dari tercapainya program tersebut bisa dilihat dari peningkatan pertumbuhan net ekspor antar wilayah Jawa Timur yakni sebesar 64,13% disbanding tahun sebelumnya.

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar negeri

Sasaran strategis yang ketiga masih mendukung tujuan yang kedua, yaitu meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan. Sehingga ditetapkan sasaran strategis yang ketiga yaitu meningkatnya net ekspor perdagangan luar negeri. Dalam sasaran strategis ketiga, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : *Persentase pertumbuhan net ekspor non migas (%),* yang mana indikator tersebut dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun

pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.24 Sasaran Strategis 3 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi/Capaian					% Capaian 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas (%)	2	-76,97	-402,03	-127,27	235,96	-106,00	-5.300

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas (%)	2	235,96	-106,00

Tabel 3.25 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi 2021	(%) Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas (%)	2	-106,00	-108

Tabel 3.24 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021		Ket. (+/-)
		Jatim	Nasional	
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri	**Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas (%)** ****) Nas.: Ekspor non migas***	**-106**	***75,86****	Net ekspor non migas Jatim: USD -0,086M (2021) USD 1,46M (2020) Net ekspor non migas Nasional: USD 48,59M (2021)* USD 27,63M (2020)
	Nilai ekspor non migas (US$ Juta)	21.301,39	219.265,2	Nilai ekspor Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 11,79% dari nilai ekspor non migas Nasional
	Nilai net ekspor non migas (US$ Juta)	-85,69	*48.597,7*	Net ekspor non migas Jatim defisit Net ekspor Nasional surplus

Tabel 3.25 : Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 2 *(Rp)*	Total Anggaran Belanja Langsung *(Rp)*	% Anggaran
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	557.516.000,-	21.874.776.500,-	2,55%

Tabel 3.26 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	2%	-106,00%	-5.300
		Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		557.516.000,-	534.366.685,-	95,85%

Tabel 3.27 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	-106%	98,85%	-204,85

Indikator pertumbuhan net ekspor non migas Jawa Timur pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 106%. Nilai net ekspor sangat dipengaruhi oleh nilai ekspor dan nilai impor. Selisih nilai ekspor dibanding nilai impor pada tahun 2021 sangat tipis (-0,86 US$ milyar) sedangkan pada tahun sebelumnya selisih nilai ekspor terhadap impor cukup besar (1,46 US$ milyar) membuat capaian di tahuh ini menjadi -106%. Kinerja ekspor tahuh 2021 sebenarnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu meningkat sebesar 16,59% dibanding tahun 2020 namun disisi yang lain kinerja impor juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 27,24%. Beberapa komoditi ekspor seperti perhiasan naik sebesar 82,45% namun beberapa komoditi ekspor seperti mesin terkontraksi sedalam 19,00%. Sedangkan impor barang luar negeri turun sebesar 8,83% disebabkan terjadinya kontraksi impor komoditas besi dan baja sedalam 38,09%, juga komoditas mesin (-5,18%), gandum (-2,48%) dan peralatan listrik (-7,08%).

Nilai ekspor non migas tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,59% dibanding tahun 2020, data BPS mencatat bahwa dari 18.270,10 Juta US$ di tahun 2020 menjadi 21.301,39 Juta US$ di tahun 2021. Hal ini seiring dengan pembukaan kembali transaksi perdaganan antar negara.

Dari tabel 3.21 dapat dilihat, ekspor non migas Jawa Timur tahun 2021 nilainya mencapai US$ 21,30 milyar memberikan kontribusi sebesar 9,71% terhadap ekspor nasional menunjukkan nilai US$ 219,27 milyar. Sedangkan nilai impor Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai nilai US$ 21,39 milyar memberikan kontribusi

sebesar 12,53 % terhadap impor nasional di tahun yang sama mencapai nilai US$ 170,67 milyar.

Tabel 3.28: Kinerja Ekspor-Impor Non Migas Tahun 2017-2021

No	Tahun	JAWA TIMUR (USD Juta)			NASIONAL (USD Juta)		KONTRIBUSI (Jatim : Nasional)	
		Ekspor	***Impor***	***Net***	***Ekspor***	***Impor***	***Ekspor***	***Impor***
1	**2017**	18.380,07	17.851,30	*528,77*	153.083,80	132.669,30	*12,01%*	*13,46%*
2	**2018**	19.019,20	20.706,22	*-1.687,02*	162.841,00	158.842,40	*11,68%*	*13,04%*
3	**2019**	19.365,75	18.930,30	*435,45*	155.893,70	148.842,10	*12,42%*	*12,72%*
4	**2020**	18.270,95	16.808,04	*1.462,91*	154.998,50	127.312,00	*11,79%*	*13,20%*
5	**2021**	21.301,39	21.387,08	*-0,086*	219.265,20	170.667,50	*9,71%*	*12,53%*

Sumber ; BPS, 2021 (diolah)

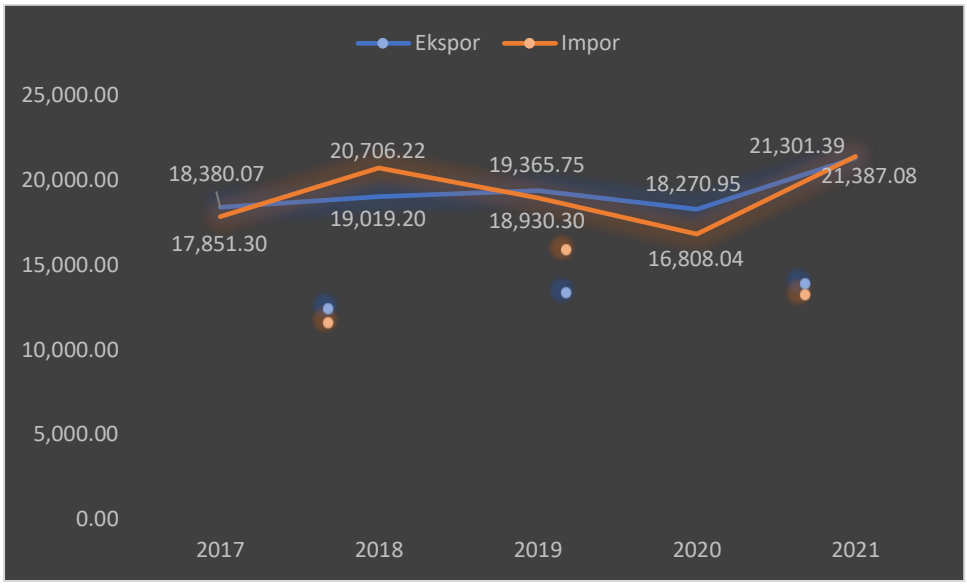

Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi hasil kerja dari seluruh *stake holder*, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, masalah perdagangan internasional adalah masalah bangsa, oleh karenanya upaya untuk mengatasinya memerlukan partisipasi semua pihak.

Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/ komoditi (standard kualitas, kuantitas dan

kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri dalam bentuk *Free Trade Agreement (FTA),* isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi ekonomi global.

Bahwa kegiatan eksportasi merupakan proses yang melibatkan mata rantai kegiatan yang cukup panjang, mulai dari bahan baku, proses produksi, promosi, pemasaran, distribusi, fiskal, perbankan, regulasi serta sarana-prasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu strategi yang diterapkan diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan pada tiap-tiap mata rantai kegiatan ekspor, antara lain :

1. *Pendekatan Kelembagaan*:

a. Target melipat-tigakan ekspor dalam lima tahun ditetapkan sebagai Target Ekspor Nasional.
b. Perlunya payung hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres), termasuk di dalamnya pembentukan Tim Pencapaian Target Ekspor Nasional (TIPTEN), agar menjadi komitmen nasional dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.

2. *Pendekatan Pasar:*

a. Strategi pasar secara detail dirancang sesuai produk berdasarkan permintaan produk tersebut yang tinggi dan kemampuan ekspor Indonesia ke pasar tersebut masih relatif rendah sehingga potensial untuk dikembangkan serta mempertimbangkan sisi supply (komposisi bahan baku dan porsi output yang diekspor).
b. Dari sisi pemasaran, diperlukan optimalisasi market intelligence → Perwakilan perdagangan (Atase Perdagangan) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di semua negara perlu dioptimalkan untuk identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik, serta menjalin hubungan dengan *buyer* dalam rangka mempertahankan penguasaan pasar ekspor

c. Membentuk Promosi Terintegrasi (nasional dan internasional) untuk menyatukan visi-misi promosi yang selama ini terpecah di berbagai lembaga.
d. Menggencarkan promosi di dalam negeri baik skala internasional, nasional, maupun daerah.
e. Membangun Distribution Center di beberapa Negara, terutama yang sudah ada Kesepakatan Sister Province.
f. Meningkatkan pengamanan perdagangan produk Indonesia di pasar internasional (tuduhan *dumping, safeguards*, dan subsidi oleh negara tujuan ekspor).

3. *Pendekatan Regulasi/Kebijakan dan lain-lain:*

a. Melakukan sinkronisasi peraturan ekspor serta sosialisasi kepada stake holder dan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor.
b. Penerapan strategi hilirisasi, yaitu melakukan ekspor dalam bentuk produk-produk hilir untuk meningkatkan nilai tambah.
c. Melibatkan Perguruan Tinggi untuk mengkaji produk dan pasar potensial Jawa Timur.
d. Penyusunan / pemetaan pengusaha potensial UKM yang berorientasi.
e. Pembuatan dashboard dengan memuat berbagai data/informasi ekspor impor yang dapat bermanfaat sebagai Early Warning System (EWS).
f. Bantuan permodalan bagi IKM melalui lembaga keuangan/ perbankan.
g. Peningkatan kerjasama antar daerah/ provinsi.
h. Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).
i. Koordinasi dengan stake holder dan dunia usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi eksportir.
j. Penyelenggaraan berbagai pelatihan ekspor.
k. Peran market intelligence Perwakilan RI di luar negeri, termasuk Perwakilan Perdagangan (Atdag) dan ITPC dalam identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik dilaksanakan dengan baik.

l. Berkurangnya kegiatan malpraktik perdagangan, antara lain perdagangan illegal fishing, perdagangan illegal logging, perdagangan illegal mining, dan under invoicing.

Pada tahun 2021 *sasaran strategis ketiga* didukung dengan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yang dilaksanakan melalui 1 (satu) unit kerja yaitu Bidang Perdagangan Internasional.

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) serta memiliki 2 (dua) sub kegiatan meliputi:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
   b. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

   Pagu anggaran sebesar Rp. 307.516.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 285.586.530,- atau 92,87%.

   *****Pada Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan terdapat 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang diampu oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 157.516.000,- yang mana masuk dalam Sasaran Strategis 2.

   Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

   Indikator program ini adalah jumlah Ijin yang diterbitkan dengan target sebanyak 130.062 ijin dimana pada tahun 2021 ini terealisasi sebanyak 144.858 ijin atau sebesar 111,37%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 dokumen rekomendasi SIUP (perdagangan dalam negeri), 144.754 ijin SKA, dan 101 ijin API (perdagangan internasional). Meskipun capaian dari program ini tercapai dengan baik, namun secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan mengingat tujuan utama dari program tersebut adalah peningkatan ekspor dan pengendalian impor karena sampai saat ini angka ekspor Jawa Timur masih defisit terhadap angka impor.

2. Program Pengembangan Ekspor, didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam Provinsi, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan meliputi:

a. Pameran Dagang Internasional/Nasional

b. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

c. Peningkatan Citra Produk Ekspor

d. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 248.780.155,- atau 99,51%.

Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

Indikator pada program ini adalah net ekspor non migas dengan target sebesar 1 milyar US$ dan realisasi -0,086 milyar US$. Meski tidak sesuai target namun nilai ekspor non migas telah mencapai surplus USD 3,03 milyar selama tahun 2021. Permasalahan utama terjadi akibat sulitnya mengatasi laju impor yang didominasi oleh bahan baku/penolong yang mencapai 71,59% dari total impor non migas. Pada tahun 2021 impor naik sebesar 27,24% dibanding tahun sebelumnya, namun kenaikan impor ini juga diikuti naiknya ekspor sebesar 16,59% pada tahun yang sama (tabel 3.21). Sehingga net ekpor non migas belum mencapai angka yang diharapkan sebesar USD 1 milyar. Pada kegiatan pelayanan ekspor sudah diterbitkan sebanyak 144.754 SKA dari 130.000 SKA yang telah ditargetkan. Untuk mendukung pengendalian dan pengawasan produk-produk impor telah dilakukan pengawasan terhadap 101 importir (API) dari 60 importir (API) yang telah ditargetkan pada tahun ini. Fasilitasi promosi internasional diberikan kepada 4 pelaku usaha potensial ekspor.

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Untuk mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yakni meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Dalam sasaran strategis ketiga, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : *Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%),* yang mana indikator tersebut dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu,

adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.29 : Sasaran Strategis 3
Tingkat Capaian Kinerja tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	**Target 2021**	**Realisasi/Capaian**					**(%) Capaian 2021**
		2017	2018	2019	2020	***2021***	
Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	***1***	-	8,60	14,82	*-53,86*	***5,30***	***530***

Tabel 3.30 : Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir periode Renstra

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Target Akhir Renstra (2024)**	**Realisasi 2021**	**(%) Tingkat Kemajuan**
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	1	5,30	530

Tabel 3.31 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Target 2021**	**Realisasi 2020**	**Realisasi 2021**
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	1%	-53,86	5,30

Tabel 3.32 : Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Anggaran Sasaran Strategis 4 *(Rp)***	**Total Anggaran Belanja Langsung *(Rp)***	**% Anggaran**
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	2.014.961.000,-	21.874.776.500,-	9,21%

Total anggaran belanja langsung diperoleh dari total anggaran Dinas dikurangi total anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (program pendukung).

Tabel 3.33 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	1%	5,30%	530%
		Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		2.014.961.000,-	1.955.752.855,-	97,06%

Tabel 3.34 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	530%	97,06%	432,94%

Untuk mendukung sektor perdagangan, pelaksanaan sasaran strategis keempat dapat dicapai melalui peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar. Di tengah maraknya peredaran produk-produk impor di masyarakat, peran perlindungan konsumen pengamanan perdagangan masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun perhitungan/formulasi untuk sasaran ini yaitu dengan mengukur peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar.

Untuk meningkatkan barang yang diawasi peran perlindungan konsumen terhadap barang beredar yang diawasi meliputi 7 parameter, yakni : *Standar, Label Bahasa Indonesia, Petunjuk Penggunaan, Jaminan Layanan Purna Jual, Cara Menjual, Pengiklanan* dan *Klausula Baku.* Sedangkan untuk sertifikasi barang beredar diukur melalui pengawasan sertifikasi mutu produk yang meliputi 23 (dua puluh tiga) komoditi potensial produk ekspor tertentu dan produk SNI wajib maupun kalibrasi atau produk-produk beredar lain yang diperlukan sertifikasi. Adapun realisasi kinerja perlindungan konsumen (tabel 3.27) dan pengamanan perdagangan (tabel 3.28) di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 3.27 dan 3.28 berikut :

Tabel 3.35 : Realisasi Kinerja Perlindungan Konsumen

	Jumlah barang diawasi	*Jumlah temuan*	*Jumlah teguran*	*Pembinaan (edukasi)*	*Jumlah pengaduan*
2017	727.628	2.600	493	800	171
2018	790.036	7.063	1.677	1.016	248
2019	906.996	46.706	454	4.889	347
2020	414.898	19.243	95	2.189	213
2021	436.812	19.990	164	1.566	227

Sumber : Disperindag Prov. Jatim (diolah)

Sedangkan Penanganan pengaduan konsumen tahun 2021 oleh BPSK (sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2020), sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ Pengaduan\ Konsumen\ yang\ ditangani\ diselesaikan\ BPSK\ th.(n)}{Jumlah\ Pengaduan\ Konsumen\ th.(n)}\ \text{X}\ 100\%$$

$$= \frac{232}{232}\ \text{X}\ 100\% \ = \ 100\%$$

Untuk kinerja UPT PSMB-LT terkait sertifikasi mutu produk ditahun 2017 sampai 2021 disajikan pada table serta grafuk di bawah:

Tabel 3.36 : Realisasi Sertifikasi Mutu Produk Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Sertifikasi Mutu Produk	***6.127***	***6.795***	***7.947***	***7.215***	***7.675***

Sumber : Disperindag Prov. Jatim (diolah)

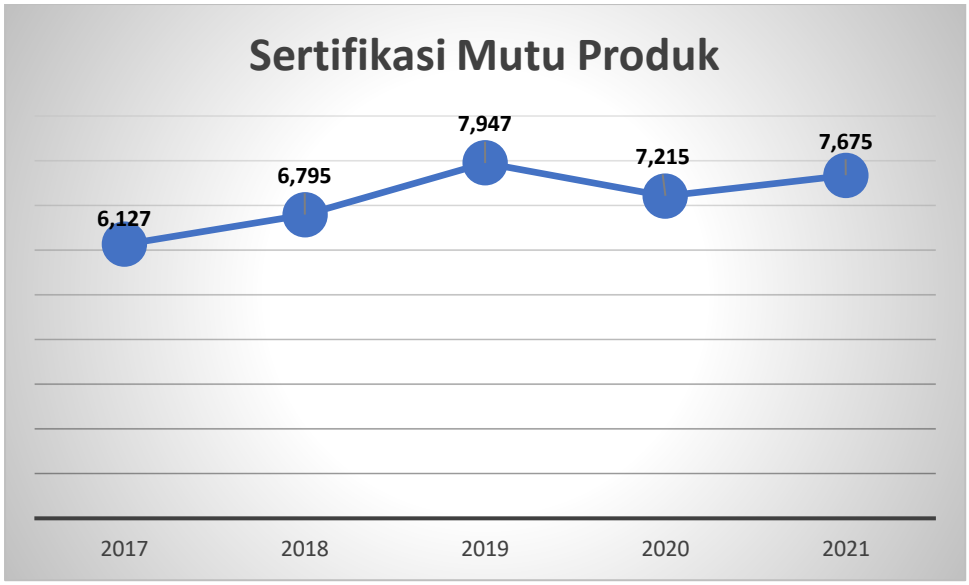

Tabel 3.37 : Rumusan Peningkatan Barang yang Diawasi dan Sertifikasi Barang Beredar Tahun 2017-2021

Rumusan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Barang Diawasi…*(A)*	**727.628**	**790.036**	**906.996**	**414.898**	**436.812**
Sertifikasi Mutu Produk…*(B)*	**6.127**	**6.795**	**7.947**	**7.215**	**7.675**
TOTAL (A) + (B) *(Jumlah barang & sertifikat)*	*733.755*	*796.831*	*914.943*	*422.113*	*444.487*
Peningkatan (A) … *(%)*	-	8,58	14,80	-54,26	5,28
Peningkatan (B) … *(%)*	-36,68	10,90	16,95	-9,21	6,36
Peningkatan Barang yang Diawasi & Sertifikasi Mutu Produk (%)	***-***	***8,60***	***14,82***	***-53,86***	***5,30***

Sumber : Disperindag Prov. Jatim (diolah)

Grafik 3.7 : Jumlah dan Persentase Barang yang Diawasi dan Sertifikasi Mutu Produk Tahun 2017-2021

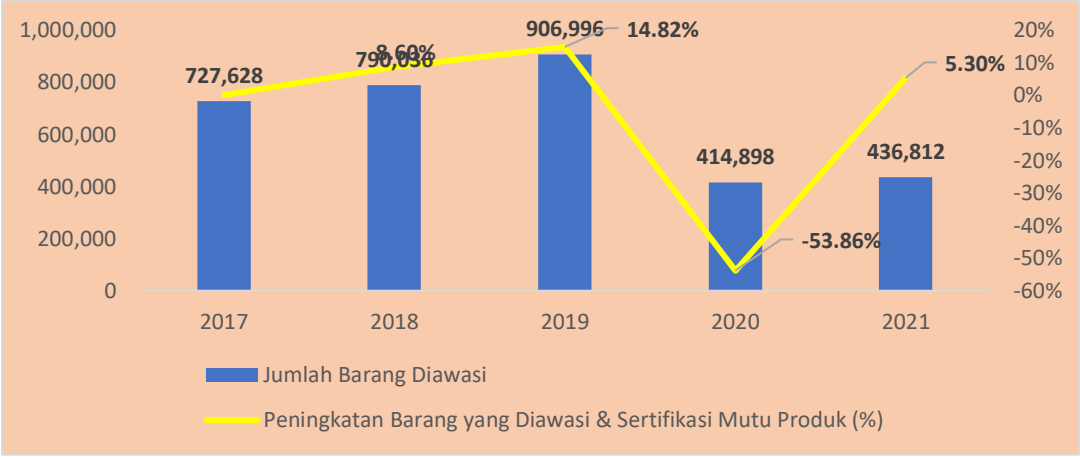

Pada tahun 2021 *sasaran strategis keempat* didukung dengan 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 unit kerja, sebagai berikut :

1. UPT Perlindungan Konsumen Wilker Surabaya;
2. UPT Perlindungan Konsumen Wilker Malang;
3. UPT Perlindungan Konsumen Wilker Kediri;
4. UPT Perlindungan Konsumen Wilker Bojonegoro;
5. UPT Perlindungan Konsumen Wilker Jember;
6. UPT PSMB-LT Surabaya;
7. UPT PSMB-LT Jember.

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
   a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
      1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
      2. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
      3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
   b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
      1. Verifikasi Mutu Produk
      2. Pengembangan Layanan Pengujian
      3. Pengembangan Layanan Sertifikasi
   c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:
      1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
      2. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

   Pagu anggaran sebesar Rp. 2.014.961.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.955.752.855,- atau 97,06%.

   Analisis program/kegiatan pada tahun 2021;

   Indikator pada program ini adalah prosentase barang beredar yang diawasai yang sesuai dengan perundang-undangan dengan target sebesar 80% dan realisasi sebesar 95,42%. Pengawasan di 5 UPT Perlindungan Konsumen selama tahun 2021 sebanyak 436.812 unit, sedangkan temuan sebanyak 19.990 unit. Sehingga hanya 4,58% yang menjadi temuan, sedangkan sisanya 95,42% bukan barang temuan atau sudah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Untuk menekan jumlah barang barang berdar, jasa dan tertib niaga yang belum sesuai dengan ketentuan maka program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilaksanakan melalui pengawasan dan tindak lanjutnya, edukasi, fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) serta pemberian dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai *supporting* dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, ditetapkan sasaran strategis ke-empat, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.38 : Sasaran Strategis 4 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2015-2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Realisasi/Capaian						% Capaian 2020
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**86,20**	86,65	86,17	86,18	90,00	90,24	**90,50**	104,99

Tabel 3.39 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	86,20	90,24	90,50

Tabel 3.40 : Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi 2021	(%) Tingkat Kemajuan
Meningkatnya	Nilai Akuntabilitas	87,00	90,50	104,02%

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah			

Tabel 3.0.41 : Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 5 *(Rp)*	Total Anggaran Belanja Langsung *(Rp)*	% Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	90.793.780.500	86.912.583.291,-	95,73%

Tabel 3.42 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	86,20	90,50	104,99%
		Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
		90.793.780.500	86.912.583.291,-	95,73%

Tabel 3.43 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	104,99 %	95,73 %	9,26

Pada tahun 2021 *sasaran strategis ke-lima* didukung dengan 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang dilaksanakan melalui 1 unit kerja, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan meliputi:
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan meliputi:
   1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan meliputi:
   1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 11 (sebelas) sub kegiatan meliputi:
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7. Penyediaan Bahan/Material
   8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:
   1. Pengadaan Mebel
   2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan meliputi:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
      Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran sebesar Rp. 90.793.780.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.912.583.291,- atau 95,73%.

Analisis program/kegiatan pada tahun 2021 :

Program terdiri dari 3 indikator, yakni persentase indikator yang tercapai sebesar 88,50% dengan realisasi sebesar 91,67%; persentase realisasi anggaran sebesar 93% yang terealisasi sebesar 94,76%; dan indeks profesionalitas ASN sebesar 90% yang terealisasi 91%. Kendala terjadi pada indeks profesionalitas ASN akibat belum semua ASN melakukan *update* data terkait pengembangan kapasitas (diklat, seminar, pelatihan, dsb). Sehingga perlu ND terkait tertib administrasi bagi ASN untuk melakukan *update* data diri.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.534.000.000,- dan dapat tercapai sebesar Rp. 6.064.495.816,72 atau terealisasi sebesar 171,60%. Adapun sumber pendapatan dari unit penghasil, dapat dilihat pada tabel 3.40.

Tabel 3.44 : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

NO	UNIT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
RETRIBUSI DAERAH		**3.504.000.000,-**	**5.883.073,984,-**	
I. Retribusi Jasa Umum		**40.000.000,-**	**54.000.000,-**	**135%**
1.	**Retribusi Pelayanan Pendidikan :**	**40.000.000**	**54.000.000,-**	**135%**
	- *UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo*	*40.000.000*	*54.000.000,-*	*135%*
II. Retribusi Jasa Usaha		**3.481.500.000,-**	**5.783.509.984,-**	
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :**	**3.385.500.000,-**	**5.674.190.834,-**	**167%**
	- *UPT PSMB-LT Surabaya*	*1.400.000.000,-*	*2.107.437.715,-*	*151%*
	- *UPT PSMB-LT Jember*	*800.000.000,-*	*793.383.500,-*	*99%*
	- *UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo*	*600.000.000,-*	*2.111.916.775,-*	*352%*

NO	UNIT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
	- *UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya*	*50.000.000,-*	*20.755.500,-*	*42%*
	- *UPTI Kulit dan Produk Kulit Magetan*	*250.000.000,-*	*402.087.450,-*	*161%*
	- *UPTI Kayu dan Produk Kayu Pasuruan*	*250.000.000,-*	*201.391.894,-*	*92%*
	- *UPTI Makanan Minuman dan Kemasan Sidoarjo*	*35.500.000,-*	*37.218.000,-*	*105%*
2	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**96.000.000,-**	**109.319.150,-**	**114%**
	- *UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya*	*96.000.000,-*	*109.319.150,-*	*114%*
3	**Jumlah Pendapatan Sewa**	**12.500.000,-**	**45.564.000,-**	**365%**
	- Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	12.500.000,-	45.564.000,-	365%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH		**30.000.000,-**	**246.619.832,72**	
III	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**30.000.000,-**	**81.843.705,84**	**272,81%**
1	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	30.000.000, -	81.843.705,84	272,81%
	- *Hasil pengelolaan Dana Bergulir*	30.000.000, -	81.843.705,84	272,81%
IV	**Lain-lain penerimaan Daerah**		**164.776.126,88-**	
1	- Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah		117.630.500,00	
2	- Pengembalian Gedung Kantor		33.810.626,88	
3	- Pengembalian kelebihan perjalanan dinas		3.245.000,00	
4	- Pengembalian Gaji dan Tunjangan		10.090.000,00	
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		**3.534.000.000,-**	**6.129.693.816,72**	**173,45%**

Sumber : Disperindag Prov. Jatim, 2021 (diolah)

Pengelompokan pagu anggaran dan realisasi APBD selama tahun 2021 per sasaran strategis dan per program dapat jabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.45 : Realisasi Anggaran APBD per Sasaran Strategis dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

SAS-GIS	ANGGARAN	REALISASI		SISA		PROGRAM
		Rp.	%	Rp.	%	
P'DUKUNG	90.793.780.500	86.912.583.291	95,73	3.881.197.209	4,27	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
MENINGKT. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	11.059.815.500	9.542.682.555	86,28	1.517.132.945	13,72	Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	50.000.000	48.176.220	96,35	1.823.780	3,65	Pengendalian Izin Usaha Industri
	100.000.000	98.016.275	98,02	1.983.725	1,98	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
MENINGKT. PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN	307.516.000	285.586.530	92,87	21.929.470	7,13	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	260.630.300	247.495.424	94,96	13.134.876	5,04	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	1.587.746.000	1.550.288.653	97,64	37.457.347	2,36	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	250.000.000	248.780.155	99,51	1.219.845	0,49	Pengembangan Ekspor
	2.014.961.000	1.955.752.855	97,06	59.208.145	2,94	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	6.244.107.700	5.874.231.750	94,08	369.875.950	5,92	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	112.668.557.000	106.763.593.708	94,76	5.904.963.292	5,24	**TOTAL BELANJA DAERAH**

Sumber : Disperindag, 2021 (diolah)

Adapun dana yang bersumber dari APBN melalui Dekonsentrasi diperoleh pada tahun 2021 dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dapat dikelompokkan sebagaimana pada tabel 3.42 berikut :

Tabel 3.46 : Realisasi APBN (Dekonsentrasi) Tahun 2021

Kode Satker	2021	PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA	
			Rp.	%	Rp.	%
KEMENPERIN (DEKONENTRASI)		**2.046.550.000**	**2.037.775.340**	**99,57**	**8.774.660**	**0,43**
090-059029	*Program Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka*	2.046.550.000	2.037.775.340	99,57	8.774.660	0,43
KEMENDAG (DEKONENTRASI)		**1.071.055.000**	**780.102.190**	**72,83**	**290.952.810**	**27,17**
090-059112	*Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah*	*789.430.000*	*518.485.490*	**65,68**	**270.944.510**	**34,32**
090-059025	*Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah*	*281.625.000*	*261.616.700*	**92,90**	**20.008.300**	**7,10**

Sumber : Disperindag, 2021 (diolah)

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berakhirnya tahun anggaran 2021 masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diharapkan Sistem Manajemen Kinerja dapat berjalan lebih optimal lagi. Sehingga perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut dan sistem informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan

perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus *(continous improvement)* dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.